

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peredaran obat herbal tidak berizin menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun pelanggaran hak konsumen. Produk yang tidak terdaftar berisiko mengandung bahan berbahaya dan tidak melalui uji klinis, yang dapat menyebabkan efek samping serius. Selain itu, kerugian ekonomi muncul akibat biaya pengobatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak kesehatan dari produk tersebut. Pelanggaran hak konsumen terjadi ketika mereka tidak mendapatkan produk yang aman dan informasi yang akurat. Meskipun BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, tantangan seperti hukuman ringan, pengawasan yang belum menyeluruh, dan fokus yang terbatas pada pasar konvensional menghambat efektivitas penanganan masalah ini.
2. Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat herbal tidak berizin merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya BPOM, yang harus memastikan produk yang beredar aman dan memenuhi standar kesehatan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, kesenjangan antara ketentuan yuridis dan praktik di lapangan masih terjadi akibat kurangnya sumber daya, kesadaran masyarakat, dan ketidakpatuhan pelaku usaha. BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan

pengawasan pre-market dan post-market, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran, namun perlu memperkuat kolaborasi dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan serta meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

3. BPOM melaksanakan upaya pengawasan peredaran obat herbal melalui pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi. Upaya preventif mencakup sistem pendaftaran produk yang ketat, edukasi masyarakat, dan kemitraan strategis untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Sementara itu, upaya represif melibatkan penegakan hukum yang tegas, termasuk pemeriksaan rutin, sanksi administratif, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan penjualan online yang sulit dilacak masih menghambat efektivitas pengawasan.

B. Saran

1. BPOM perlu memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha obat herbal tidak berizin, termasuk penarikan dan pemusnahan produk serta pencabutan izin usaha. Selain itu, pengawasan harus diperluas ke platform *e-commerce* untuk mengatasi peredaran produk ilegal secara daring. Edukasi masyarakat juga harus ditingkatkan agar konsumen lebih memahami cara memilih produk yang aman dan berkualitas. Dengan kolaborasi antara BPOM, stakeholder, dan masyarakat, serta pemanfaatan

teknologi, diharapkan peredaran obat herbal tidak berizin dapat diminimalisir, sehingga masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan dan kerugian lainnya.

2. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, BPOM harus memperkuat pengawasan dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat, dalam pengawasan obat herbal. Penegakan hukum harus mencakup sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku usaha yang melanggar, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Selain itu, BPOM perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan yang lebih efektif, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau peredaran obat herbal secara daring. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran obat herbal tidak berizin dapat diminimalisir, melindungi kesehatan masyarakat secara optimal.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, BPOM perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memantau peredaran obat herbal secara daring. Peningkatan anggaran untuk pengawasan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya produk berizin juga sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BPOM dapat lebih efektif melindungi masyarakat dan menciptakan ekosistem usaha obat herbal yang sehat dan bertanggung jawab.